

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reduksi data dan sajian data di atas, maka dapat diverifikasi sebagai berikut :

1. Transparansi dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan transparansi kepada masyarakat dan sesuai dengan indikator yang di teliti oleh peneliti bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan akses kepada masyarakat berupa website yang di dalamnya menjelaskan tentang transparansi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan atau Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya langsung ke kantor Dinas Kebudayaan untuk menanyakan penggunaan Dana Keistimewaan.

Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan kejelasan dan kelengkapan datanya untuk diakses oleh masyarakat lewat media internet berupa kejelasan kegiatan dan penggunaan dana istimewa serta monitoring ataupun melalui media cetak serta elektronik yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan DIY.

Sesuai dengan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera maka Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan keterbukaan proses kepada masyarakat dengan cara menggelar forum keistimewaan untuk membahas dana keistimewaan yang dapat dihadiri oleh masyarakat serta kebebasan masyarakat dalam memberikan usul program kegiatan dan untuk menyaring aspirasi masyarakat, Dinas Kebudayaan DIY mengadakan Musrenbang.

Apabila masyarakat ingin ikut memanfaatkan dana istimewa dengan kebudayaan atau seni yang dimiliki, maka Dinas Kebudayaan DIY juga telah menyediakan keterbukaan dengan melalui prosedur yang berlaku.

Transparansi yang sejatinya harus dilakukan Pemerintah tentunya mempunyai kerangka regulasi yang jelas, begitupula dengan Dinas Kebudayaan DIY dalam menyampaikan transparansi kepada masyarakat sesuai dengan dasar regulasi yang dimilikinya yaitu UUD tentang Keuangan Negara, UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, Perda no 33 tentang pengelolaan dana istimewa dan Pergub serta Proseduur pengelolaan dana keistimewaan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan empat indikator yaitu; 1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, 2. Kejelasan dan kelengkapan

informasi, 3. Keterbukaan proses dan 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keakuratan informasi menjadi hal penting dalam mendapatkan informasi, begitupun masyarakat menginginkan keakuratan dalam mendapatkan informasi, Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara akurat yakni dengan mengakses website Dinas Kebudayaan untuk kegiatan, bappeda, SKPD dalam hal penggunaan danais atau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya baik secara langsung yakni datang ke Kantor Dinas Kebudayaan DIY dan tidak langsung yakni lewat email Dinas Kebudayaan DIY atau website di kotak pertanyaan, saran dan usulan.

B. Saran

Pertanyaan yang akan diajukan masyarakat tentang transparansi tentunya menjadi hal yang sangat umum ditanyakan sehingga Dinas Kebudayaan DIY telah mempersiapkan metode dalam menjawab pertanyaan melalui media apa dan dimana, salah satu media selain yang telah disebutkan di atas, terdapat media untuk menyediakan informasi yang

jelas mengenai prosedur dan biaya dalam musyawarah yakni musrenbang untuk mengelola aspirasi masyarakat, forum keistimewaan untuk membahas dana istimewa yang di dalamnya masyarakat selain mendapatkan informasi tentang dana istimewa juga diberi kebebasan dalam menyampaikan usulan terhadap program kegiatan kebudayaan yang akan dilakukan selanjutnya serta menginformasikan prosedur-prosedur yang harus diikuti jika masyarakat akan memanfaatkan dana istimewa dalam memajukan dan mengembangkan kebudayaan di DIY.

Faktor selanjutnya menyangkut kemudahan mengakses dan kendala yang dialami oleh Dinas Kebudayaan DIY. Kemudahan mengakses tidak lagi menjadi faktor menghambat setelah Dinas Kebudayaan DIY menginformasikan secara gamblang tentang ketersediaan informasi dana keistimewaan digunakan baik melalui media internet yakni website, media cetak dan media elektronik yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan DIY mengaku tidak ada kendala yang berarti dalam melakukan transparansi rencana, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang menyangkut dana keistimewaan walaupun beberapa masyarakat terkadang sulit mengakses karena media pasti terdapat error jaringan atau sistem, namun pihak Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan alternatif lain yakni mendatangi kantor atau bertanya lewat email Dinas kebudayaan serta bertanya di kotak pertanyaan, saran dan usul.

